

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired
Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* di Kabupaten Semarang**

Oleh:

Diyannita Indah Kurniasari

(14010110141037)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Semarang regency is one of regencies in Central Java which has high risk of Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS) transmission. Factors that cause it is because there is a high potential tourist attractions and places of prostitution in Semarang regency. Therefore, local government make local regulations number 3 in 2010 which contained of HIV prevention to decrease HIV transmission in Semarang regency. Besides, this regulation aimed to persuade people to concern and prevent about HIV transmission actively.

The objective of this study to know the implementation of local regulations number 3 in 2010 which contained of HIV preventions in Semarang regency and obstacles since the regulations has been applied. This study using a qualitative design with descriptive method. The results of this research were analyzed based on Edward's III theory about four variables to observe the implementation of the policy ; communication, resource, disposition, and bureaucracy structure.

Communication is carried out by AIDS commission and related institution through socialization to the target groups such as HIV-AIDS sufferer, high-risk persons who can be infected HIV-AIDS, and people around the regency of Semarang. Resources variables are divided into two parts; human and financial resources. AIDS commission and health workers as human resources who have interaction with the target groups. Meanwhile, financial resources obtained from regional budget and global fund as foreign aid. In disposition aspect has been well done. It can be observed from services given by AIDS commission and related institution to HIV-AIDS sufferer. Many training are also conducted to improve commitment and ability of health workers. In bureaucracy structure, indicate that government has a long

bureaucracyal structure because of HIV-AIDS preventions are complex problems and many people have to get involved.

In the other hand, the implementation of local regulations have some barriers from each variables. Communication barriers due to the education level of sex workers is low. It can influence lack of knowledge in understanding socialization. From the aspect of resources, especially financial resources, occurred the threat because of foreign aid from the global fund will be dismissed in 2015. For disposition aspect, people still get unsatisfactory services. Meanwhile, the structure of bureaucracy barriers caused by the lack of a decree that governs the law technically in 2013. In addition, stakeholders in the AIDS commission bureaucratic structure has not been completely perform basic tasks functions of HIV-AIDS preventions.

The implementation of local regulations number 3 in 2010 about HIV-AIDS preventions in Semarang regency has been applied well by AIDS commission and related institution. However, there needs to be increased in disposition and bureaucratic structure. Long bureaucratic structure in AIDS commission is not expected to be an obstacle in implementing the law. Therefore, the need for cooperation by all institutions which are involved in AIDS commission in order to carry out basic tasks in accordance with the responsibilities. By the implementation of the main function of AIDS commission optimally, HIV-AIDS transmission can be minimized and the implementation of local regulation provide a positive impact to the community.

Keywords : Implementation, prevention, HIV-AIDS

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan alat kendali bagi berjalannya sebuah daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah harus memperhatikan aspek kepentingan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan setiap masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk dapat menangani masalah di bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1) pada point nomor 5 yang dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berskala Kabupaten / Kota adalah penanganan di bidang kesehatan , sehingga

Pemerintah Daerah harus dapat menanggulangi penyebaran penyakit berbahaya yang ada di dalam masyarakat, seperti penanggulangan penyebaran *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*.

Penyakit HIV-AIDS merupakan penyakit infeksi menular yang telah menyebar secara luas di masyarakat. Penyakit ini termasuk kategori penyakit menular kronis yang berbeda dengan penyakit yang lainnya. Orang yang terinfeksi HIV-AIDS harus menanggung beban fisik akibat dari proses penyakit dan timbulnya infeksi sekunder, beban emosional yaitu depresi akibat ketidakpastian proses penyembuhan dan kematian yang setiap saat menghantui dan beban psikososial seperti diskriminasi dan isolasi sosial akibat ketidakmampuan mereka menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber dukungan sosial.¹

Masih banyaknya masyarakat yang terjangkit HIV-AIDS disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya infeksi HIV antara lain yaitu risiko perilaku seksual dan perilaku penggunaan jarum suntik penasin, risiko sosial ekonomi terkait kurangnya informasi dan kemiskinan, dan penyesuaian tumbuh kembang pada usia remaja beranjak dewasa. Namun selain faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya infeksi HIV, terdapat pula subpopulasi kelompok yang beresiko terinfeksi HIV-AIDS, subpopulasi kelompok yang

¹Setyoadi & Endang Triyanto. 2012. *Strategi Pelayanan Keperawatan bagi Penderita AIDS*. Yogyakarta : Graha Ilmu

beresiko terinfeksi HIV-AIDS tersebut adalah pekerja seksual, pengguna narkoba jarum suntik, homoseksual, anak dari ibu dengan HIV-AIDS, dan narapidana.²

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah masyarakat pengidap HIV-AIDS yang relatif besar. Masih cukup banyaknya masyarakat yang mengidap HIV-AIDS di Kabupaten Semarang disebabkan karena masih adanya tempat di Kabupaten Semarang yang beresiko tinggi terjadinya penularan penyakit HIV-AIDS dari satu orang kepada orang yang lain. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, terdapat 4 tempat lokalisasi atau lokasi berpotensi tinggi di Kabupaten Semarang yang ditunjukkan dengan data sebagai berikut³ :

1. Lokalisasi atau lokasi berpotensi tinggi Bandungan di Kecamatan Bandungan
2. Lokalisasi atau lokasi berpotensi tinggi Sukosari di Kecamatan Bawen
3. Lokalisasi atau lokasi berpotensi tinggi Tegalpanas di Kecamatan Bergas
4. Lokalisasi atau lokasi berpotensi tinggi Kopeng di Kecamatan Getasan

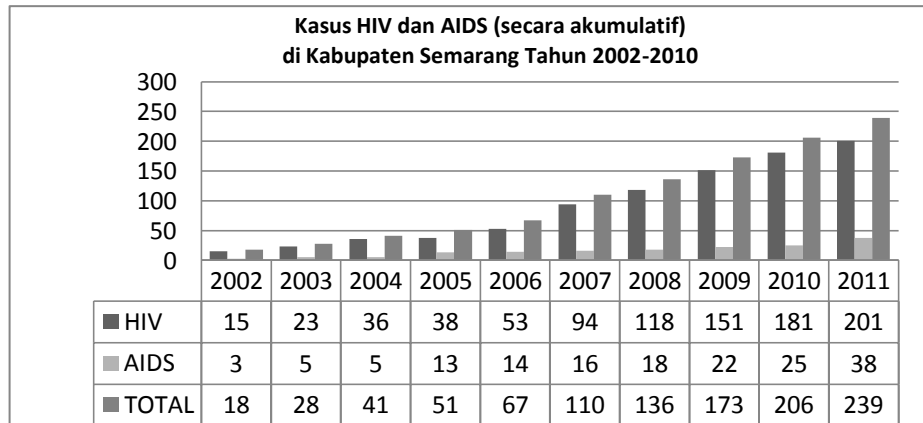
Terdapatnya tempat lokalisasi atau lokasi berpotensi tinggi di Kabupaten Semarang merupakan salah satu penyebab jumlah pengidap HIV-AIDS di Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan jumlah

²Ibid

³Hasil wawancara dengan Ibu Sri Ekowati selaku Staff bagian penanggulangan HIV – AIDS Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Tgl 25 Februari 2013

pengidap HIV-AIDS di Kabupaten Semarang ditunjukkan dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang ditunjukkan dengan data berikut :

Grafik Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Semarang pada tahun 2002-2011



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Terdapatnya tempat-tempat beresiko tinggi terhadap penularan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang dan semakin meningkatnya jumlah pengidap HIV-AIDS dari tahun ke tahun menuntut adanya peran dari Pemerintah Daerah untuk dapat menanggulangi penyebaran HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang merupakan suatu kebijakan yang sangatlah tepat diterapkan untuk dapat meminimalisir penyebaran HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat implementasi dari kebijakan tersebut. Dengan melihat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang maka dapat diketahui bagaimana kebijakan tersebut

dijalankan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

B. PEMBAHASAN

B.1 Kebijakan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* di Kabupaten Semarang

Kebijakan merupakan suatu langkah awal dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk dapat menanggapi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Diberlakukannya desentralisasi atau otonomi daerah berarti memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk dapat membentuk suatu kebijakan sebagai bentuk tanggapan terhadap permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Suatu peraturan daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan pada tingkat daerah. Peraturan daerah bertujuan untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Terbentuknya peraturan daerah akan memberikan landasan hukum dalam penyelesaian suatu permasalahan di dalam suatu daerah.

Dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 memberikan dampak yang besar dalam Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 tersebut maka akan terdapat kebijakan dan strategi dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan perlindungan yang harus dilaksanakan dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Selain itu, dengan terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 maka akan terdapat jaminan terhadap keberadaan Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA) yang secara khusus memiliki peran dan fungsi dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang.

B.2 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* di Kabupaten Semarang

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.⁴ Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang akan dijabarkan sebagai berikut :

Komunikasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS beserta instansi dan lembaga yang ada di dalamnya diberikan kepada Penderita HIV-AIDS atau biasa disebut dengan ODHA, masyarakat, ataupun orang yang rentan terjangkit HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS bertujuan agar kelompok sasaran dapat lebih menjaga diri dari ancaman penularan penyakit HIV-AIDS. Sosialisasi tentang penggunaan kondom juga dilakukan bersama dengan sosialisasi tentang penanggulangan HIV-AIDS disebabkan penggunaan kondom merupakan salah

⁴Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

satu cara atau upaya untuk melakukan pencegahan dalam penyebaran HIV-AIDS di kelompok beresiko tinggi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang juga dilaksanakan di Perusahaan. Komisi Penanggulangan AIDS mendorong perusahaan agar terdapat program HIV-AIDS di dalam perusahaan dengan mengundang manajerial dan bagian K3 (kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan). Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah terbentuknya tim inti di perusahaan yang akan melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan konseling sehingga diharapkan perusahaan dapat melakukan penanggulangan, pencegahan, penanganan secara mandiri serta diharapkan hak ODHA di perusahaan akan dapat terjamin.⁵

Komunikasi antara Komisi Penanggulangan AIDS dengan ODHA juga sudah terjalin dengan baik. Dimana komunikasi yang terjalin antara Komisi Penanggulangan AIDS dengan ODHA dilakukan melalui kelompok dukungan sebaya (KDS) yang rutin setiap bulan mengadakan pertemuan.⁶ Kelompok Dukungan Sebaya merupakan perkumpulan dari para ODHA dengan saling memberikan dukungan. Dibentuknya Kelompok Dukungan Sebaya sangatlah dibutuhkan sebagai upaya dalam meningkatkan semangat bagi para ODHA dan dapat dijadikan sebagai wadah untuk bertemu dengan para pelaksana kebijakan guna meningkatkan derajat dari para ODHA.

⁵Diolah dari hasil wawancara dengan Bapak Taufik Kurniawan selaku Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang. Tgl 2 Desember 2013

⁶Ibid

Sosialisasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang memang sangat diperlukan untuk dapat menekan penyebaran HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Kelompok sasaran harus mengetahui dan memahami tentang program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Adanya pemahaman dari kelompok sasaran merupakan salah satu faktor utama keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh seluruh implementor.

Sumber Daya

Dalam implementasi suatu kebijakan sangatlah diperlukan adanya sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dengan adanya sumber daya yang memadai maka pelaksanaan dari suatu kebijakan akan dapat berjalan secara efektif. Pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan suatu kebijakan merupakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan. Sedangkan sumber daya finansial merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya alokasi dana maka implementasi dari suatu kebijakan akan dapat dilaksanakan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 sudah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS yang memiliki peran dan fungsi dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Di dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang terdapat instansi dan lembaga terkait

yang memiliki peran masing-masing dalam Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Selain itu, sudah terdapat banyak tenaga medis yang tersebar di seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Semarang untuk dapat menunjang kesehatan bagi para ODHA.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 sumber alokasi dana dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang juga telah tersedia yang berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri mampu memberikan suntikan dana yang begitu besar dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Bantuan luar negeri yang saat ini menyokong dana dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang berasal dari *Global Fund (GF)*.

Disposisi

Karakteristik dari para pelaksana suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting agar suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 terdapat banyak instansi dan lembaga yang menjadi bagian dalam Komisi Penanggulangan AIDS, dimana setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Karakteristik atau watak dari para pelaksana kebijakan akan sangat menentukan kebijakan dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang, berbagai bentuk kegiatan dan pelayanan telah dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang beserta instansi serta lembaga yang terlibat di dalamnya. Pelayanan yang diberikan kepada kelompok sasaran merupakan salah satu aspek dalam melihat watak dan karakteristik dari para pelaksana kebijakan. Dengan diberikannya pelayanan kepada kelompok sasaran maka kebijakan yang dijalankan akan mampu memberikan dampak positif kepada kelompok sasaran.

Pelayanan dan berbagai program yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS beserta instansi atau lembaga yang terlibat di dalamnya kepada kelompok sasaran menunjukkan bahwa disposisi dari para implementor memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dalam Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Semarang.

Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sangatlah diperlukan adanya struktur birokrasi atau struktur organisasi yang ada didalamnya. Dengan adanya struktur organisasi maka akan terdapat pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang telah terbentuk Komisi Penanggulangan AIDS sebagai struktur organisasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Dalam struktur organisasi Komisi

Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang memiliki struktur organisasi yang panjang disebabkan banyak instansi dan lembaga yang terlibat di dalamnya.

Banyaknya instansi atau lembaga di dalam tubuh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang dapat dilihat karena proses Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang merupakan hal yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan peran serta dari banyak pihak. Namun, hingga saat ini belum seluruh instansi dan lembaga yang menjadi bagian dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang.⁷ Hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang.

Struktur organisasi akan dapat berjalan secara maksimal apabila seluruh pihak dalam satu keanggotaan mampu menjalankan peran dan fungsi yang telah diberikan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari masing-masing pihak yang terlibat dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS untuk dapat menjalankan peran dan fungsi yang telah diberikan. Dengan adanya komitmen dari setiap pihak maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang dapat berjalan secara lebih maksimal dan struktur organisasi yang panjang di dalam tubuh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang tidak akan menjadi kendala.

⁷Ibid

Salah satu aspek lain yang penting dalam struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP akan menjadi pedoman dan acuan bagi setiap implementor dalam bertindak. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang telah tercantum adanya Tata Kerja atau prosedur operasi yang standar Komisi Penanggulangan AIDS yang dibahas pada pasal 15 dan 16. Point-point dalam tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang harus dilakukan dengan seksama. Dengan dijalankannya kebijakan sesuai dengan tata kerja ataupun prosedur operasi yang standar maka implementor akan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang telah ada.

B.3 Hambatan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* di Kabupaten Semarang

Dalam melihat hambatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang juga akan dijabarkan menurut pandangan Edwards III yang mencakup empat variabel, yakni : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Hambatan sering kali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang pun terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi oleh instansi dan lembaga di dalam keanggotaan Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA). Dari segi komunikasi salah satu hambatan yang muncul yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dari para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menyebabkan informasi atau sosialisasi yang diberikan tentang Penanggulangan HIV-AIDS akan sulit dipahami oleh para Pekerja Seks Komersial.

Adanya hambatan dalam variabel komunikasi, sangatlah diperlukan adanya sosialisasi secara berkesinambungan kepada kelompok sasaran agar hambatan yang tersedia dapat diminimalisir. Sosialisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan sangatlah diperlukan agar kelompok sasaran dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan yang akan dijalankan oleh implementor.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang tidak terdapat kendala dalam variabel sumber daya, namun terdapat ancaman yang disebabkan pada tahun 2015 bantuan dana luar negeri dari *Global Fund* akan berhenti.⁸ Pada kenyataannya, support bantuan dana dari lembaga luar negeri memiliki peranan yang sangat besar dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Bantuan luar negeri akan sangat membantu dan menyokong dana dalam penanggulangan HIV-AIDS selain dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, apabila

⁸Ibid

dana bantuan dari luar negeri telah berhenti akan dapat menimbulkan kendala dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang.

Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang seharusnya mampu memberikan landasan agar proses penanggulangan HIV-AIDS dapat terus berjalan. Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus menyadari bahwa penanggulangan HIV-AIDS merupakan kebijakan yang sangatlah penting dilaksanakan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya alokasi dana yang lebih besar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam penanggulangan HIV-AIDS setelah berhentinya bantuan dana dari luar negeri. Adanya alternatif atau solusi dalam menghadapi ancaman yang tersedia sangatlah perlu dilakukan sedini mungkin. Hal ini dilakukan untuk dapat menekan ancaman yang tersedia, sehingga para implementor telah siap dalam menghadapi ancaman yang akan datang dan kebijakan pun akan dapat terus berjalan.

Disposisi

Pelayanan yang diberikan kepada kelompok sasaran akan mampu menunjukkan disposisi dari para implementor. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang hambatan yang muncul disebabkan masih kurang maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ODHA. Hal ini merupakan pernyataan dari salah satu ODHA yang peneliti wawancara. Kurang maksimalnya

pelayanan yang diberikan disebabkan masih kurangnya tenaga kesehatan yang secara khusus menangani pasien ODHA.⁹

Masih adanya pelayanan yang kurang maksimal harus dapat segera diatasi dengan diberikannya kebutuhan sesuai dengan harapan kelompok sasaran. Diberikannya pelayanan yang memadai kepada kelompok sasaran dan diberikannya kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok sasaran merupakan salah satu bentuk komitmen dari para implementor untuk dapat menjalankan suatu kebijakan secara efektif. Dengan adanya pelayanan yang memadai kepada kelompok sasaran maka suatu kebijakan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif kepada kelompok sasaran.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Struktur organisasi merupakan gambaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang masih terdapat hambatan dalam variabel struktur birokrasi yang disebabkan belum seluruh instansi dan lembaga di dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peran masing-masing pihak. Pada kenyataannya, struktur organisasi yang panjang menyebabkan suatu kebijakan berjalan secara rumit dan tidak efektif. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari seluruh implementor

⁹Diolah dari hasil wawancara dengan inisial T, salah satu ODHA di Kabupaten Semarang. Tgl 14 November 2013

untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran masing-masing pihak. Apabila semua pihak yang terlibat dalam struktur birokrasi dapat melakukan tugas dan fungsinya secara efektif maka struktur organisasi yang panjang pun tidak akan menjadi kendala dan justru akan menjadi faktor dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang juga belum dibentuk adanya Peraturan Bupati yang dapat memuat kebijakan secara lebih rinci dan lebih teknis.¹⁰ Hal ini juga menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus dapat segera membentuk Peraturan Bupati. Dengan adanya Peraturan Bupati diharapkan pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang akan dapat berjalan secara lebih efektif dan maksimal.

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang telah mampu dilaksanakan dengan cukup baik oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang. Hal ini dilihat dari sudah dilaksanakannya

¹⁰Diolah dari hasil wawancara dengan Bapak Taufik Kurniawan selaku Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang. Tgl 2 Desember 2013

sosialisasi kepada kelompok sasaran dan sudah tersediannya sumber daya, dimana sumber daya finansial diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan luar negeri. Sedangkan sumber daya manusia telah terdapat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang serta tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Semarang. Berbagai pelayanan kesehatan pun telah diberikan kepada ODHA untuk tetap mempertahankan kekebalan tubuh. Di dalam struktur organisasi Komisi Penanggulangan AIDS terdapat berbagai instansi dan lembaga yang bertujuan untuk dapat meminimalisir penyebaran HIV-AIDS di kalangan masyarakat.

2. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang masih diperlukan adanya peningkatan yang disebabkan masih adanya berbagai hambatan, baik dari internal maupun external. Dalam hambatan internal masih diperlukan peningkatan dalam efektifitas struktur organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang. Hal ini dilihat karena belum seluruh instansi dan lembaga di dalam Komisi Penanggulangan AIDS yang menjalankan peran dan fungsinya dalam Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Selain itu, masih dirasakan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh kelompok sasaran menunjukkan bahwa masih perlu adanya peningkatan dalam variabel disposisi. Sedangkan dari external, hambatan yang muncul disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dari para Pekerja Seks Komersial (PSK)

yang menyebabkan sosialisasi yang diberikan tentang Penanggulangan HIV-AIDS akan sulit dipahami. Masih terdapatnya hambatan menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang.

C.2 Saran

1. Bagi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penanggulangan HIV-AIDS harus mampu melakukan kerjasama dengan seluruh instansi dan lembaga yang menjadi bagian dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS sehingga proses penanggulangan HIV-AIDS akan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Selain itu, belum seluruh instansi dan lembaga di dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS yang menjalankan tugas pokok fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing dalam penanggulangan HIV-AIDS harus diperhatikan secara serius, sehingga struktur organisasi yang panjang dalam Komisi Penanggulangan AIDS pun tidak akan menjadi kendala namun dapat menjadi faktor keberhasilan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang. Selain itu, upaya pencegahan terhadap penularan HIV-AIDS pun harus diperhatikan secara serius, sehingga diharapkan jumlah pengidap HIV-AIDS di Kabupaten Semarang tidak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

Berbagai kendala yang dihadapi dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang harus segera diatasi dan dapat ditemukan solusi sehingga proses penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Semarang akan dapat berjalan dengan lancar. Terdapatnya ancaman tentang berhentinya bantuan luar negeri menuntut adanya peran dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah untuk dapat mempersiapkan sumber dana yang mencukupi dan memadai dalam penanggulangan HIV-AIDS, sehingga ketika bantuan luar negeri sudah tidak tersedia, proses penanggulangan HIV-AIDS akan dapat terus berjalan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Setyoadi & Endang Triyanto. 2012. *Strategi Pelayanan Keperawatan bagi Penderita AIDS*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Berkas Wawancara

Berkas wawancara dengan Bapak Taufik Kurniawan selaku Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang. Tgl 2 Desember 2013

Berkas wawancara dengan Ibu Sri Ekowati selaku Staff bagian penanggulangan HIV – AIDS Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Tgl 25 Februari 2013

Berkas wawancara dengan inisial T, salah satu ODHA di Kabupaten Semarang. Tgl 14 November 2013